

EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN MIMIKA

Marthen Luther Rumboirusy *¹

STIE Jambatan Bulan
mrumboirusy@gmail.com

Darius Sabon Rain

STIE Jambatan Bulan
dariussabon@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of using village income to support development in Kampung Kadun Jaya. The research method used in this research is descriptive research method. The data used is qualitative and quantitative data, which was collected using observation, interviews, documentation and questionnaires. To measure the effectiveness value in more detail, criteria based on Decree of the Minister of Home Affairs No. 690,900,327 of 1996 concerning Performance Appraisal Guidelines. The results of this research indicate that overall the implementation of the internal control system in collecting Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (PBB-P2) is ineffective with the effectiveness ratio still below 60%.

Keywords: Effectiveness, Internal Control System, Tax Collection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, yang dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berjalan tidak efektif dengan rasio efektivitas masih di bawah 60%.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Pengendalian Internal, Pemungutan Pajak.

Pendahuluan

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan amanat dari Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diatur lebih lanjut dengan

¹ Korespondensi Penulis.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengendalian intern pemerintah ini penting karena dapat digunakan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan pada setiap organisasi pemerintahan. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan kualitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah masih lemahnya tingkat pemahaman, kesadaran dan kapasitas aparatur sipil negara dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga cita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa sulit diwujudkan.

Dalam aspek pengawasan, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum efektifnya sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga menjadi salah satu penyebab masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) Tahun 2019 menunjukkan skor indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2019 berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100. Pernilaian CPI didasarkan pada skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019>)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. Artinya Badan Pendapatan Daerah melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai instansi pengelola perpajakan daerah dan retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui LAKIP. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), ada sejumlah permasalahan internal yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain; (1) masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia, (2) belum efektifnya koordinasi antar pegawai, antar sub bidang maupun antar bidang, (3) kurangnya disiplin pegawai, (4) sarana dan prasarana belum memadai, (5) kurangnya penegakan aturan yang tegas bagi setiap pelanggaran dan lain-lain. Sebagai dampak dari permasalahan ini maka realisasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PBB-P2 belum berjalan secara optimal.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2
Tahun 2018 – 2022

TAHUN	DENGAN PTFI			TANPA PTFI		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2018	41.110.105.796	41.150.222.737	100	6.500.000.000	6.396.823.561	98
2019	41.500.000.000	42.280.699.003	102	7.500.000.000	7.582.426.627	101
2020	50.000.000.000	51.661.638.006	103	8.000.000.000	9.036.622.630	113
2021	57.000.000.000	57.364.800.322	101	10.000.000.000	10.255.319.914	103
2022	59.000.000.000	35.509.107.981	60	12.000.000.000	4.396.500.621	37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan kinerja pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mimika, dimana penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2018 – 2022 kontribusi terbesar berasal dari PT. Freeport Indonesia. Jika dilihat dari pencapaian target penerimaan tanpa PT. Freeport Indonesia, maka pada tahun 2018 dan 2022, realisasi PBB-P2 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja pemungutan pajak khususnya PBB-P2 di Kabupaten Mimika belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor yang diduga sebagai penyebab belum optimalnya kinerja pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Mimika adalah kurang efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi pengelola PBB-P2. Jika sistem pengendalian internal dalam pemungutan PBB-P2 dilaksanakan secara efektif maka dimungkinkan penerimaan PBB-P2 setiap tahun akan lebih optimal sehingga target penerimaan yang ditetapkan dapat tercapai.

Kondisi ini yang menarik peneliti dengan mengangkat judul: “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Mimika”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata ingin mengungkapkan suatu keadaan/ gejala atau peristiwa sebagaimana adanya yang nyata-nyata terjadi (Supardi, 2005:27).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Deskripsi Variabel

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diamati dan dianalisis dalam penelitian ini mencakup 5 aspek antara lain; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan kondisi dalam organisasi pemerintah yang dapat meningkatkan kesadaran semua pegawai akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Terhadap lingkungan pengendalian yang ada di BAPENDA Kabupaten Mimika telah dilakukan penelitian melalui kuesioner dan hasil penilaian lingkungan pengendalian berdasarkan persepsi responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hasil Skor Tanggapan Responden
Terhadap Aspek Lingkungan Pengendalian

Aspek	No.	Indikator	Skor Rata-rata	Ket.
Lingkungan Pengendalian	1	Struktur organisasi di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 terdapat pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pendataan dan penilaian, penerimaan, manajemen IT, penagihan dan pengawasan.	3	Sebagian besar
	2	Struktur organisasi di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 telah memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi.	3	Sebagian besar

	3	Di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari atasan kepada bawahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan PBB-P2 disertai instruksi yang baik dan jelas.	2	Sebagian kecil
	4	Jumlah pejabat dan pegawai di bidang PBB telah sesuai dengan analisis beban kerja.	2	Sebagian kecil
	5	Di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 telah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal.	2	Sebagian kecil

Sumber: Pengolahan Data Primer, tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan skor rata-rata tanggapan responden terhadap aspek Lingkungan Pengendalian dalam sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Pada indikator 1 dan 2, diperoleh skor rata-rata sebesar 3 artinya struktur organisasi di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 sebagian besar sudah terdapat pemisahan fungsi antara pelayanan, pendataan dan penilaian, penerimaan, manajemen IT, penagihan dan pengawasan juga sebagian besar telah memuat garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Pada indikator 3, 4 dan 5 diperoleh skor rata-rata sebesar 2 (sebagian kecil), artinya bahwa di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 baru sebagian kecil terjadi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan yang dalam pengelolaan PBB-P2, sebagian kecil jumlah pejabat dan pegawai di bidang PBB tidak sesuai dengan analisis beban kerja dan baru sebagian kecil fungsi pemeriksaan internal terlaksana dengan baik.

Penilaian risiko

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan analisis risiko.

Tabel 5.2
Hasil Skor Tanggapan Responden
Terhadap Aspek Penilaian Risiko

Aspek	No.	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Ket.
-------	-----	------------	----------------	------

Penilaian Risiko	6	BAPENDA telah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat penerimaan PBB-P2 seperti tidak sampainya SPPT PBB ke wajib pajak, pendataan dan penilaian objek pajak yang tidak akurat, dll.	3	Sebagian besar
	7	BAPENDA telah mengantisipasi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan PBB-P2.	2	Sebagian kecil
	8	BAPENDA telah mengantisipasi kelemahan-kelemahan penggunaan teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi, seperti back up data jika data yang tersimpan dalam komputer hilang, kemacetan program, tidak berfungsinya aplikasi pembayaran PBB-P2, dll.	3	Sebagian besar
	9	BAPENDA telah mengantisipasi jika terjadi perubahan personil, seperti melakukan mutasi di lingkungan Bapenda atau unit kerja yang mengganggu penilaian objek PBB, pembukuan, IT dll.	3	Sebagian besar
	10	BAPENDA telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan pemungutan PBB-P2, misalnya penggelapan pajak, pendataan objek pajak yang tidak benar, perhitungan pajak yang tidak benar, dll.	2	Sebagian kecil

Sumber: Pengolahan Data Primer, tahun 2023

Tabel 5.2 di atas menunjukkan skor rata-rata tanggapan responden terhadap aspek Penilaian Risiko dalam sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Pada indikator 6, 8 dan 9, diperoleh skor rata-rata sebesar 3 (sebagian besar), artinya sebagian besar proses identifikasi risiko, langkah antisipasi kelemahan penggunaan teknologi dan perubahan personil sebagian besar sudah berjalan baik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Sedangkan pada indikator 7 dan 10 diperoleh skor rata-rata sebesar 2 (sebagian kecil), artinya sebagian kecil sudah ada langkah antisipasi risiko sebagai akibat dari adanya perubahan undang-undang dan penyimpangan pemungutan PBB-P2 yang terjadi lapangan.

Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Tabel 5.3
Hasil Skor Tanggapan Responden
Terhadap Aspek Kegiatan Pengendalian

Aspek	No.	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Ket.
Kegiatan Pengendalian	11	Laporan pencapaian kinerja pegawai telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada pimpinan.	2	Jarang
	12	Pimpinan melaksanakan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja utama dan ada tindak lanjut atas perbedaan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan.	2	Jarang
	13	Pimpinan memperhatikan pemisahan tugas di antara unit kerja/ sub bidang yang berbeda (pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan lain-lain) untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak.	2	Jarang
	14	Unit kerja telah mengatur pembatasan akses terhadap dokumen, cetakan, aset, data, aplikasi serta mempunyai mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi dan kejadian penting.	3	Sering
	15	Pelaksanaan semua tahapan kegiatan telah didukung dengan dokumentasi yang cukup dan diarsipkan dengan baik.	2	Jarang

Sumber: Pengolahan Data Primer, tahun 2023

Tabel 5.3 di atas memperlihatkan skor rata-rata tanggapan responden terhadap aspek Kegiatan Pengendalian dalam sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Pada indikator 11, 12, 13 dan 15 diperoleh skor rata-rata sebesar 2 (jarang). Hal ini menunjukkan bahwa laporan pencapaian kinerja jarang disampaikan secara berkala kepada pimpinan, jarang dilakukan evaluasi terhadap

capaian indikator kinerja utama, jarang ada pemisahan tugas diantara sub bidang yang berbeda dan semua tahapan kegiatan jarang didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik. Sedangkan pada indikator 14 diperoleh skor rata-rata sebesar 3 (sering), artinya sering dilakukan pembatasan akses terhadap dokumen atau hal-hal lain yang dianggap penting.

Informasi dan komunikasi

Setiap instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok. Informasi tersebut harus ditampung dan dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang membutuhkan.

Tabel 5.4
Hasil Skor Tanggapan Responden
Terhadap Aspek Informasi dan Komunikasi

Aspek	No.	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Ket.
Informasi dan Komunikasi	16	Informasi tentang pengelolaan PBB-P2 tersedia bagi semua pihak terkait dengan rincian yang cukup dan jelas.	3	Sebagian besar
	17	Terdapat saluran/ alat komunikasi yang cukup dan efektif untuk menginformasikan hal-hal penting terkait pengelolaan PBB-P2, baik sesama fiskus, masyarakat wajib pajak, rekanan, konsultan, aparat pengawas intern pemerintah dan kelompok lainnya.	3	Sebagian besar
	18	Terdapat saluran komunikasi yang terbuka untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan PBB-P2.	2	Sebagian kecil
	19	Ada respon yang cepat dan tepat waktu terhadap semua laporan yang diterima dari masyarakat, rekanan dan pihak eksternal lainnya.	2	Sebagian kecil

	20	Terdapat perlindungan bagi pihak pegawai yang menyampaikan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar atau penyimpangan.	2	Sebagian kecil
--	----	---	---	----------------

Sumber: Pengolahan Data Primer, tahun 2023

Tabel 5.4 menunjukkan skor rata-rata tanggapan responden terhadap aspek Informasi dan Komunikasi dalam sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Pada indikator 16 dan 17 diperoleh skor rata-rata sebesar 3 (sebagian besar), artinya sebagian besar informasi tentang pengelolaan PBB-P2 tersedia bagi semua pihak terkait dan sebagian besar terdapat saluran/ alat komunikasi yang cukup dan efektif untuk menginformasikan hal-hal penting terkait pengelolaan PBB-P2. Sedangkan pada indikator 18, 19 dan 20 diperoleh skor rata-rata sebesar 2 (sebagian kecil), artinya baru sebagian kecil saluran komunikasi yang terbuka untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan PBB-P2, baru sebagian kecil ada respon yang cepat dan tepat waktu terhadap semua laporan yang diterima dari masyarakat dan juga baru sebagian kecil ada perlindungan bagi pihak pegawai yang menyampaikan informasi terkait penyimpangan yang terjadi.

Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan pengecekan atas kualitas kinerja sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh unsur pimpinan secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah.

Tabel 5.5
Hasil Skor Tanggapan Responden
Terhadap Aspek Pemantauan Pengendalian Intern

Aspek	No.	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Ket.
Pemantauan Pengendalian Intern	21	BAPENDA memiliki strategi/kebijakan/ prosedur pemantauan berkelanjutan (supervise kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk membuktikan bahwa aktivitas pengendalian sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.	2	Sebagian kecil

	22	Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan telah dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai yang ada di BAPENDA.	2	Sebagian kecil
	23	Setiap level pimpinan di BAPENDA telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada semua tahapan kegiatan (seluruh kegiatan) yang ada di BAPENDA.	3	Sering
	24	Setiap level pimpinan di BAPENDA telah melakukan evaluasi pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian secara berkala dan terdokumentasi.	3	Sering
	25	Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian tersebut telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara otomatis/online oleh pimpinan BAPENDA.	2	Sebagian kecil

Sumber: Pengolahan Data Primer, tahun 2023

Tabel 5.4 menunjukkan skor rata-rata tanggapan responden terhadap aspek Pemantauan Pengendalian Intern dalam sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Pada indikator 21, 22 dan 25 diperoleh skor rata-rata sebesar 2. Hal ini berarti Bapenda masih belum memenuhi prosedur. Sebagian kecil sudah dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai dan sebagian kecil telah dikembangkan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara otomatis/online. Sedangkan pada indikator 23 dan 24 diperoleh skor rata-rata sebesar 3, artinya setiap level pimpinan sering melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada semua tahapan kegiatan dan sering melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.

Analisis Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan PBB-P2, dilihat dari rasio antara skor aktual dan skor ideal. Sebagaimana rumus yang telah ditetapkan maka tingkat efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6
Rasio Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Dalam Pemungutan PBB-P2

No.	Aspek	Total Skor Aktual	Total Skor Ideal	%	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	467	760	61,45	Kurang efektif
2	Penilaian Resiko	495	760	65,13	Kurang efektif
3	Kegiatan Pengendalian	343	760	45,13	Tidak efektif
4	Informasi dan Komunikasi	450	760	59,21	Tidak efektif
5	Pemantauan Pengendalian Intern	420	760	55,26	Tidak efektif
	Total	2175	3800	57,24	Tidak efektif

Sumber: Pengolahan Data Primer, tahun 2023

Tabel 5.6 memperlihatkan rasio efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan PBB-P2. Cakupan sistem pengendalian internal dalam pemungutan PBB-P2 terdiri dari 5 aspek. Pada aspek Lingkungan Pengendalian, diperoleh rasio efektivitas sebesar 61,45% sehingga sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan berada pada kategori “kurang efektif. Pada aspek Penilaian Risiko, rasio efektivitas mencapai 65,13% atau berada pada kategori “kurang efektif”. Sedangkan pada ketiga aspek yang lain yakni kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern, masing-masing memperoleh rasio di bawah 60% sehingga berada pada kategori “tidak efektif”. Jika dilihat secara keseluruhan, rasio efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan PBB-P2 hanya mencapai 57,24% atau berada di bawah 60% sehingga dikategorikan “tidak efektif”.

Pembahasan Hasil Analisis

Pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika berjalan “tidak efektif”. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang dapat membangun kesadaran semua pegawai akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas pengelolaan PBB-P2 yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk memperkuat lingkungan pengendalian ini maka struktur organisasi di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 harus ada pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pendataan dan penilaian, penerimaan, manajemen IT, penagihan dan pengawasan. Disamping itu struktur organisasi di BAPENDA khususnya di Bidang PBB-P2 harus memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Penting juga ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari atasan kepada bawahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan PBB-P2 disertai instruksi yang baik dan jelas. Jumlah pejabat dan pegawai yang ada dalam organisasi harus sesuai dengan analisis beban kerja. Dan dalam internal organisasi harus secara rutin melaksanakan fungsi pemeriksaan internal.

Hasil penelitian lingkungan pengendalian berdasarkan persepsi responden menunjukkan proses identifikasi risiko, langkah antisipasi kelemahan penggunaan teknologi dan perubahan personil sebagian besar sudah berjalan baik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Sedangkan langkah antisipasi risiko sebagai akibat dari adanya perubahan undang-undang dan penyimpangan pemungutan PBB-P2 yang terjadi lapangan baru berjalan sebagian kecil.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisis risiko. Sebagai sebuah organisasi, BAPENDA harus mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat penerimaan PBB-P2, mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan PBB-P2, kelemahan-kelemahan penggunaan teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi, terjadi perubahan personil dan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemungutan PBB-P2 di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses identifikasi risiko, langkah antisipasi kelemahan penggunaan teknologi dan perubahan personil sebagian besar sudah berjalan baik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Sedangkan pada indikator yang lain seperti langkah antisipasi risiko sebagai akibat dari adanya perubahan undang-undang dan penyimpangan pemungutan PBB-P2 yang terjadi lapangan baru berjalan sebagian kecil.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dengan membuat suatu kebijakan dan prosedur tertentu yang harus dilaksanakan dalam organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek ini laporan pencapaian kinerja jarang disampaikan secara berkala kepada pimpinan, jarang dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama, jarang ada pemisahan tugas diantara sub bidang yang

berbeda dan semua tahapan kegiatan jarang didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik. Sedangkan pada indikator yang lain sudah berjalan baik seperti sering dilakukan pembatasan akses terhadap dokumen atau hal-hal lain yang dianggap penting.

Terhadap aspek kegiatan pengendalian ini, beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain mewajibkan setiap pegawai agar menyampaikan laporan pencapaian kinerja secara berkala dan tepat waktu kepada pimpinan. Pimpinan wajib melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja pegawai sehingga pemimpin dapat menindak lanjuti perbedaan capaian kinerja dengan yang direncanakan. Unsur pimpinan juga harus memperhatikan pemisahan tugas di antara sub bidang yang berbeda seperti bagian pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan lain-lain untuk mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan resiko kecurangan yang tidak layak. Unit kerja yang penting dan vital harus mengatur pembatasan akses terhadap dokumen, cetakan, aset, data, aplikasi serta mempunyai mekanisme otorisasi dan persetujuan kejadian penting. Dan semua tahapan harus didokumentasi dan diarsipkan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi ini sangat penting diperhatikan oleh setiap organisasi perangkat daerah. Setiap pimpinan instansi pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek informasi dan komunikasi, sebagian besar informasi tentang pengelolaan PBB-P2 tersedia bagi semua pihak terkait dan sebagian besar terdapat saluran/ alat komunikasi yang cukup dan efektif untuk menginformasikan hal-hal penting terkait pengelolaan PBB-P2. Sedangkan pada indikator yang lain baru sebagian kecil saluran komunikasi yang terbuka untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan PBB-P2, baru sebagian kecil ada respon yang cepat dan tepat waktu terhadap semua laporan yang diterima dari masyarakat dan juga baru sebagian kecil ada pegawai yang memberikan informasi terkait penyimpangan yang terjadi.

Hal-hal yang perlu diperbaiki pada indikator ini seperti informasi tentang pengelolaan PBB-P2 harus tersedia bagi semua pihak terkait dengan rincian yang cukup dan jelas. Saluran/ alat komunikasi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan efektif untuk menginformasikan hal-hal penting terkait pengelolaan PBB-P2, baik antar sesama fiskus, masyarakat wajib pajak, rekanan, konsultan, aparat pengawas intern pemerintah serta kelompok lainnya. Di samping itu perlu ada saluran komunikasi yang terbuka untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan PBB-P2. Setiap pegawai perlu merespon dengan cepat dan tepat semua laporan dari masyarakat, dan pihak dari luar. Perlu juga ada jaminan perlindungan bagi para pegawai yang menyampaikan aduan tentang perilaku yang tidak benar atau penyimpangan yang terjadi.

Pemantauan Pengendalian Intern

Kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek ini, Bapenda masih memiliki sebagian kecil prosedur berkelanjutan, prosedur sebagian kecil sudah dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai dan sebagian kecil telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara otomatis. Sedangkan pada indikator yang lain, sudah berjalan dengan baik seperti setiap level pimpinan sering melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada semua tahapan kegiatan dan sering melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam aspek ini antara lain organisasi harus memiliki strategi/kebijakan/ prosedur pemantauan berkelanjutan seperti supervise kegiatan, rekonsiliasi data, sidak, dan prosedur lainnya untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pimpinan dan pegawai yang ada. Setiap level pimpinan harus melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada semua kegiatan yang ada. Setiap level pimpinan harus melakukan evaluasi pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian secara berkala dan terdokumentasi. Disamping itu perlu dikembangkan secara terus menerus strategi/kebijakan/prosedur sesuai dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berjalan tidak efektif dengan rasio efektivitas masih di bawah 60%. Pada aspek Lingkungan Pengendalian, diperoleh rasio efektivitas sebesar 61,45% sehingga berada pada kategori “kurang efektif. Pada aspek Penilaian Risiko, rasio efektivitas mencapai 65,13% atau berada pada kategori “kurang efektif”. Sedangkan pada ketiga aspek yang lain yakni kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern, masing-masing memperoleh rasio di bawah 60% sehingga berada pada kategori “tidak efektif”.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi sebagai usul/ saran antara lain:

1. Beberapa aspek pengendalian lingkungan internal yang mendapatkan skor terendah seperti kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal perlu ditingkatkan lagi agar kinerja pengelolaan PBB-P2 dapat meningkat dalam jangka panjang.

2. Perlu ada laporan kinerja pegawai secara berkala dan perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi oleh unsur pimpinan agar kinerja pegawai yang tidak maksimal dapat diambil langkah-langkah perbaikan.
3. Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola PBB-P2 perlu menyiapkan saluran komunikasi yang memadai agar dapat memperlancar komunikasi dan informasi bagi pihak terkait, baik secara intern maupun dengan pihak luar terutama wajib pajak.
4. Semua organisasi perangkat daerah terutama Badan Pendapatan Daerah harus memiliki strategi/kebijakan/prosedur pemantauan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan lingkungan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Supardi, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta.
- Gulo, 2007, *Metode Penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Gendro Wiyono, 2011, *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS dan Smart PLS*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019>)